

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemiskinan adalah kelangkaan atau kurangnya jumlah barang atau uang material (varian) tertentu.¹ Bank Dunia: Kemiskinan diucapkan sebagai kekurangan kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk pendapatan rendah dan ketidakmampuan untuk memperoleh barang-barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat. Kemiskinan juga mencakup tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, akses yang buruk ke air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kurangnya kapasitas dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik.² Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi

¹ [Poverty](#). merriam-webster. diterbitkan 18 November 2013

² ["Poverty and Inequality Analysis"](#). worldbank.org. diterbitkan 27 May 2011

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.³ Sesuai UU diatas, penjelasan secara mendalam mengenai maksud fakir miskin adalah mereka yang tidak bisa memenuhi atau bahkan mencukupi kehidupannya sesuai dengan standar atau rata-rata kehidupan social di negara ataupun daerah dimana manusia tinggal. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka fakir miskin secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,70 km², dan terbagi dalam 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan⁴. Dilansir dari website resmi Badan Pusat Statistik bahwa sebanyak 73.650 jiwa yang termasuk dalam kategori miskin di Kota Semarang pada tahun 2018. Angka ini sudah melalui verifikasi dan identifikasi pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas warga yang masuk dalam kategori sangat miskin. Sementara jumlah penduduk Kota Semarang dari data Dispendukcapil mencapai 1.668.578 jiwa⁵, angka ini merupakan angka yang diperoleh Dispendukcapil hingga akhir Desember 2018. Dengan

³ Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

⁴ online. <http://Semarangkota.go.id/kondisiumum>. Diakses 16 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB.

⁵ online. <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/public/index.php/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-12-02>. Diakses 16 Oktober 2019 pukul 14.31 WIB.

demikian, diperoleh prosentase warga miskin sebesar 22,65 persen dari total warga Semarang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk

meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Demi menanggulangi kemiskinan pemerintah melalui Kementerian Sosial menciptakan banyak program bantuan social diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) yang diciptakan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat tidak mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok yang diciptakan pemerintah berupa pemberian bantuan pangan non tunai kepada masyarakat(Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulanya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara). Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya. Namun penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS,

peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik terdapat sistem Saving account dan e-Wallet/dompot elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya. Tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan (PKH) dan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,serta PERMENSOS No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Eletronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017,

tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya Bantuan Pangan Non Tunai memiliki struktur pelaksana dan berjenjang,yakni pada tim koordinasi kota Walikota menjadi penanggung jawab program,ketua pelaksana kepada sekretaris daerah dan sekretaris menjadi tanggung jawab kepala Dinas Sosial Kota Semarang. Sedangkan pada tingkat Kecamatan penanggung jawab menjadi tugas Camat,Ketua pelaksana Sekretaris Kecamatan dan sekretaris menjadi tanggung jawab Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan,sementara pada tingkat kelurahan penanggung jawab adalah lurah,ketua pelaksana sekretaris lurah dan sekretaris adalah bidang kesejahteraan social kelurahan serta PSM yang berfungsi mencari data Keluarga Penerima Manfaat(KPM). Dalam hal penyaluran BNI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang sebagai bank penyalur bantuan. Selain itu di bentuk tim pengendali dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT) sesuai dengan perpres No.63 Tahun 2017, tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), wakil ketua adalah Menteri perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/ kepala bappenas dan sekretari adalah

Sekretariat Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan anggota Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait termasuk kantor staf kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kota Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi 16 Kecamatan di Kota Semarang,sebanyak 39.013 Keluarga Penerima Manfaat(KPM) menerima Bantuan Pangan Non-Tunai.

Tabel 1. 1 Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Kota Semarang Tahun 2019

Kecamatan	KPM	BDT
Banyumanik	2.210	4.230
Candisari	2.011	4.033
Gajah Mungkur	955	1.967
Gayamsari	2.299	3.096
Genuk	3.041	5.071

Gunung Pati	3.005	4.502
Mijen	2.556	3.845
Ngaliyan	1.865	3.371
Pedurungan	2.780	5.401
Semarang Barat	3.098	8.045
Semarang Selatan	1.461	2.924
Semarang Tengah	1.591	2.984
Semarang Timur	2.636	4.315
Sematang Utara	3.856	8.215
Tembalang	3.563	5.246
Tugu	601	1.003

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2019 (diolah)

Data berikut, adalah data yang saya peroleh terkait implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) di Kota Semarang pada tahun 2019, dalam hal penyaluran bantuan Dinas Sosial Kota Semarang memperoleh kuota tersendiri dari Kementerian Sosial RI sebanyak 39.031, pada kelurahan Tugu dan Semarang Utara memiliki jumlah presentase penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai terbanyak dan tersedikit dengan Kecamatan Tugu sebanyak 601 penerima Bantuan dan Semarang Utara dengan 3.856 penerima bantuan. Pada hal ini fokus kajian peneliti adalah mengetahui, mendeskripsikan serta dapat menjelaskan dengan mengambil sampel pada kedua Kecamatan terkait yaitu melalui Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Utara.

Di daerah Kecamatan Tugu dan Semarang Utara tersebut juga masih belum tepat sasaran, menurut salah seorang warga dari hasil pengamatan sementara mengatakan bahwa bantuan non tunai di Kecamatan Tugu dan Semarang Utara melalui E-Warong di salah satu kelurahan tersebut belum tepat sasaran, seperti beras, gula, minyak goreng, dan ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kecukupan secara materil akan tetapi dapan bantuan tersebut, bantuan juga di salurkan kepada keluarga terdekat walaupun keluarga itu tergolong mampu secara ekonomi. Dalam hal pemverifikasian dan pemvalidasian Dinas Sosial Kota Semarang melakukannya pada jangka 4 bulan sekali yaitu Januari-April dan Juli-Oktober. Dalam penyaluran bantuan banyak kendala yang dialami Dinas Sosial Kota Semarang yang akan dibahas lebih lanjut didalam Bab Pembahasan mengenai pengimplementasian Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan di Kota Semarang. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Implementasi Program Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kota Semarang Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjabaran latar belakang diatas maka masalah yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Semarang pada Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukanya penelitian **“Implementasi Program Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kota Semarang Tahun 2019”** adalah:

1. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menjelaskan keberhasilan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Semarang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak secara teoritis maupun praktis. Antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun menambah referensi serta kontribusi terhadap ilmu pemerintahan terkait peran SIKS-NG dalam memetakan program bantuan social pangan di Kota Semarang

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Dosen

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi bagi para dosen dalam kajian mengenai hal – hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Kebijakan Publik

Berbagai literatur mendefinisikan kebijakan publik, baik arti luas maupun arti sempit. Menurut Young dan Quin, dalam Edi Suharto (2006:44) konsep kunci kebijakan publik adalah: - Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. - Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat. - Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. - Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. - Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana

tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Secara umum, pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Istilah kebijakan (policy) ini juga seringkali dipergunakan untuk menunjuk pada perilaku aktor seperti seorang pejabat, kelompok, maupun lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (Budi Winarno, 2007: 16). Kajian kebijakan publik meliputi mencakup penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Putt dan Springer, 1989:30). Ketiga tahap tersebut diuraikan secara holistik maksud kebijakan sebagai suatu proses manajemen dan dapat dipahami. Dalam hal ini Hoogerwerf berpendapat bahwa pengertian Kebijakan Publik pada hakekatnya adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan tindakan yang terarah (Sjahrir, 1988: 66). Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya *Power and Society* menjelaskan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (a projected program of goals, values and practices) Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, 1970:71). Ahli lain, Carl J. Friedrich

mendefinisikan kebijaksanaan adalah “... sebuah rangkaian tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kendalakenadala hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu” (...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose) (Carl J. Friedrich, 1979:3). Selanjutnya James E. Anderson berpendapat bahwa kebijaksanaan itu adalah “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu” (a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern) pada James E. Anderson (2006: 6). Lebih luas lagi James E. Anderson dalam M. Irfan Islamy (2004:19) mendefinisikan kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials). Implikasi dari pengertian tersebut adalah: - Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. - Bahwa kebijaksanaan itu

berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. - Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. - Bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif yang berarti pemerintah telah melakukan sesuatu dalam mengatasi suatu masalah tertentu dan bersifat negatif apabila keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu apapun. - Bahwa kebijaksanaan pemerintah selalu didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Masih banyak lagi konsep-konsep kebijakan yang diajukan oleh para ahli sesuai dengan pendekatan dan disiplin ilmu kajiannya masing-masing. Dengan demikian, Winarno berpendapat perlu ada batasan-batasan atau rumusan konsep kebijakan publik yang tepat. Sebab, masing-masing disiplin mempunyai penekanan yang berbeda-beda (Budi Winarno, 2007:15). Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk keperluan analisis dan kegunaan masing-masing konsep. Selanjutnya, secara operasional dapat ditangkap manfaat dalam mengkomunikasikan konsep-konsep kebijakan publik ini. Amir Santoso mengelompokkan kebijakan publik dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan,

memandang bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang diramalkan. Para ahli yang masuk dalam kelompok pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik berarti, “Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang melaksanakan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan kebijakan”. Sedangkan kelompok kedua lebih melihat kebijakan publik dari rangkaian keputusan dan tindakan (Amir Santoso, 1993: 4-5). Mengacu pada kategori pertama, penyusunan kebijakan publik diawali oleh rumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini Mustopadidjaja berpendapat bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi publik ataupun bisnis yang bertujuan mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (Mustopadidjaja, 2000: 6-7), yaitu: - Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan - Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik berhubungan dengan unit organisasi pelaksana

maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M.Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan (M. Irfan Islamy, 2004: 20). Secara lebih detail M. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu: - Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakantindakan pemerintah. - Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata - Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. - Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Berkenaan dengan peran otoritas pemerintah, David

Easton mengartikan kebijaksanaan negara sebagai: "pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat (The Authoritative allocation of values for the whole society). Menurut pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, berarti pemerintah telah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kebijakan publik akan mudah diimplementasikan apabila mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Easton David, 1953:129). Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang mempengaruhinya. Kerangka kerja kebijakan publik sangat ditentukan oleh faktor variabel yang terkandung di dalamnya (AG Subarsono, 2005: 3). Variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut: - Tujuan yang hendak dicapai - Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan - Sumber daya yang mendukung kebijakan - Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan - Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik - Strategi yang digunakan.

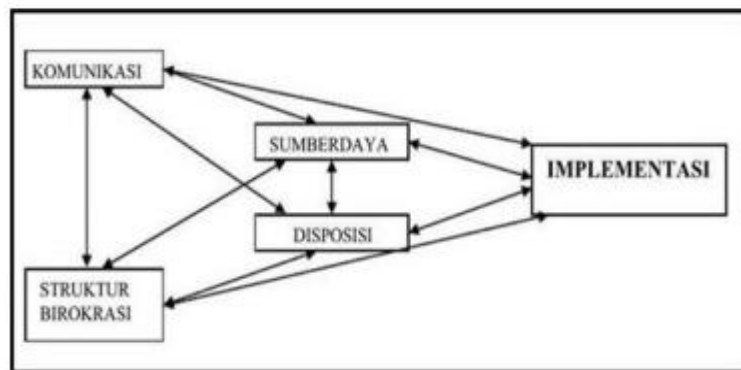
1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002: 101-102). Secara harafiah implementasi merupakan aksi ataupun tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang telah diterbitkan. Dalam perwujudan bentuk kebijakan perlu adanya hal-hal yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam aksi pelaksanaan kebijakan. Meminimalisir permasalahan tindakan dalam langkah mewujudkan kebijakan menjadi salah satu langkah penting untuk mengatasi dampak buruk dari kebijakan. Implementasi Kebijakan Publik adalah salah satu kegiatan didalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu berkaitan erat dengan kepentingan publik dan kemudian bisa diterima oleh publik. Yang menjadi fokus peneliti adalah melihat bagaimana tingkat kepatuhan (compliance) dalam sebuah implementasi proses kebijakan, karena dengan melihat kepatuhan bisa menilai bagaimana sebuah kebijakan bisa di evaluasi dengan kesimpulan gagal atau berhasil. Kepatuhan (compliance) disini juga melihat apakah yang diperintahkan sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, atau justru terjadi ketidakcocokan. Untuk melihat bagaimana implementasi proses kebijakan dijalankan terkait kepatuhan (compliance), maka peneliti mencoba melihat variabel-variabel yang bisa menjadi fokus dengan menggunakan model implementasi Geoge C. Edwards III yang melihat empat faktor sebagai pertimbangan melihat bagaimana

implementasi kebijakan dijalankan, dan dengan metode ini juga dapat menjawab bagaimana variabel kepatuhan (compliance) atau faktor didalam proses implementasi kebijakan.

Gambar 1. 1 Pendekatan Implementasi



Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George Edward II mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi,yaitu: (Nugroho, 2009: 512)

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokasi)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar pelaku implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan. Didalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan,hal tersebut diakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan

memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi Transformasi (*transmission*), Kejelasan (*clarity*), dan Konsistensi (*consistency*).

Dimensi transformasi bermaksud kebijakan publik di transformasikan kepada para pelaksana, target sasaran dan kelompok atau pihak lain yang terkait pada kebijakan tersebut. Dimensi kejelasan bermaksud agar kelompok-kelompok sasaran (pelaksana, target sasaran dan kelompok) mendapatkan informasi yang jelas sehingga tidak terjadi distorsi informasi antara pelaksana program, target sasaran serta kelompok yang terlibat dalam kepentingan.

Sumber daya menjadi salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan program (implementasi), sumber daya sangat mendukung keberjalanan program seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi bergantung kepada sumber daya manusia (aparatur pelaksana), dengan demikian sumber daya harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugas. Sumber daya manusia haruslah memiliki ketepatan dan kelayakan seperti

jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai.

Sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi, keberadaan anggaran sangat berkorelasi terhadap keberjalanan program. Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan berkurang seperti disposisi para pelaku rendahan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan menjadi berperan dalam pengimplementasian kebijakan, peralatan merupakan sarana operasionalisasi kebijakan yang meliputi Gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dan implementasi kebijakan (Nugroho, 2009:512).

Ketiga, Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Karakter penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi, antara lain yaitu:

pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral dan menolak (*acceptance, neutrality and rejection*), intensitas terhadap kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105)

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang ditetapkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena mereka menjadi acuan implementator.

1) Model Rasional (Top Down)

Model Rasional (top down) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi fakto-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Menurut Parsons (2008), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Van

Meter dan van Horn menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terwujud. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka akan terjadi multi tafsir dan akan mudah menimbulkan konflik di antara para pelaksana sebagai implementor. Selain itu, perlu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-humanresources). Dalam banyak kasus, selain sumber daya, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk keberhasilan suatu program. Karakteristik agen pelaksana yang dimaksud van Meter dan van Horn adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Selain itu, yang tak kalah penting adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak); bagaimana pendapat dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut. Di samping itu, peran sikap implementor juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap

implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) kongnisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ahli kebijakan yang mengembangkan pendekatan ini adalah Merilee S Grindle dalam Abdul Wahab (1997), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) isi kebijakan; (2) manfaat yang diterima oleh target kelompok; (3) perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) ketepatan program; (5) kejelasan implementator; dan (6) dukungan sumber daya yang memadai, baik yang terkait besarnya otoritas, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, serta karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuan dan responsivitas kelompok sasaran.

2) Model Pendekatan Bottom-Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan

pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith dalam Islamy (2004), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy (2004), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : (1) Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya; (2) Target groups: yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan; (3) Implementing organization: yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam

implementasi kebijakan; dan (4) Environmental factors: unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Edward II mengemukakan beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: (Nugroho, 2009:512)

1. Komunikasi

Pada Komunikasi implementasi mensyaratkan para implementator mengerti bahwa terdapat sasaran dan tujuan kebijakan untuk mengurangi kesalahan dalam mengeksekusi program kebijakan. Didalam Komunikasi Implementasi Kebijakan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan Transformasi, Kejelasan dan Konsistensi. Pada dimensi transformasi dilihat bahwa apakah maksud dari kebijakan tersebut sudah ditransformasikan secara jelas kepada para pelaksana, target sasaran dan kelompok lain yang terkait pada kebijakan tersebut. Dimensi kejelasan bermaksud agar kelompok-kelompok sasaran program dapat mengerti informasi secara jelas sehingga tidak terjadi distorsi informasi antara pelaksana dan sasaran. Pada dimensi konsistensi, dapat dilihat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan arahan peraturan yang sudah ditransformasikan.

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan program (implementasi), sumber daya sangat mendukung

keberjalanan program seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumberdaya informasi dan kewenangan. Pada variable manusia,dapat dilihat apakah aparatur tersebut memiliki kemampuan dan kompetensi melaksanakan tugas dari kebijakan,bagaimana sumberdaya tersebut mengarahkan sumberdaya lain(bawahan/pelaksana program) dalam melaksanakan kebijakan,berapa jumlah implementator program dan apakah sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sesuai. Pada sumber daya anggaran,terdapat faktor penting bahwa berapakah dana yang dianggarkan untuk pengimplementasian program kebijakan yang dilaksanakan,apakah dana yang sudah dianggarkan memenuhi sasaran. Pada sumberdaya peralatan berperan penting pada pengimplementasian kebijakan yang meliputi Gedung,tanah dan sarana yang memudahkan pelayanan dan implementasi kebijakan(Nugroho, 2009:512).

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (pejabat publik). Karakter yang harus dimiliki seorang pejabat publik adalah kejujuran,komitmen dan demokratis. Dalam hal kejujuran apakah program kebijakan sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Dalam hal komitmen bagaimana seorang implemantator dapat menjalankan programnya, . Implementor yang memiliki komitmen tinggi maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn

terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi, antara lain yaitu: pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral dan menolak (*acceptance, neutrality and rejection*), intensitas terhadap kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang ditetapkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena mereka menjadi acuan implementator.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis lalu dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga

dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto, 1986: 51).

Model dari data penelitian yang diperoleh berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002: 51). Bukan hanya itu saja, hal ini menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2000: 17).

1.7.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian sebagai sasaran pendukung bila dimungkinkan yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yakni Dinas Sosial serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tugu dan Semarang Utara sebagai penerima bantuan terbanyak dan tersedikit dikarenakan data yang diambil berupa *Cluster Sampling Area*.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah satu sumber dalam pengumpulan data-data yang relevan serta akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penelitian ditentukan secara *purposive sampling* sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrahman (2012: 20) bahwa informan yang dipilih sebagai kelompok yang dianggap mengetahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan

kaitanya dengan Implementasi Bantuan Pangan dalam penyeluhuan bantuan social pangan non tunai di kota Semarang.

1.8 Jenis Data

Untuk mencapai semua tujuan penelitian, peneliti perlu menentukan secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan karena dapat membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori responden yang sesuai.

1.8.1 Opini

Pertanyaan tentang opini yang menanyakan kepada responden apa yang mereka pikirkan tentang satu isu atau kejadian dalam kehidupan sosial. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hindrawan (2012: 12) bahwa “opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan (konotatif).”

1.8.2 Tindakan

Pertanyaan tentang perilaku meminta keterangan kepada responden tentang apa yang telah orang lakukan pada masa lalu, sekarang atau baru-baru ini, dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada masa yang akan datang. Menurut Hadari dan Martini (2006: 98) mengatakan bahwa data adalah bentuk dari tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, ide serta pengetahuan individu

mengenai segala sesuatu yang dipertanyakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.8.3 Fakta

Pertanyaan tentang fakta berhubungan dengan apa yang diketahui dan karakteristik responden atau latar belakang informan, seperti pertanyaan tentang usia, pekerjaan dan lain-lain yang relevan untuk mengetahui perbandingan informan dengan opininya..

1.9 Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1.9.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, pada penelitian ini data primer akan didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk lapora dan dengan cara melakukan wawancara mendalam pada para narasumber dan melakukan observasi atau pengamatan terbuka terkait dengan kondisi alam, lingkungan sosio-kultural yang ada.

Dalam penelitian ini, ditetapkan informan yang dilakukan pada wawancara yaitu informan kunci yaitu Pemerintah Kota Semarang dan informan akademisi yaitu informan yang tidak terlibat tetapi tahu akan permasalahan, terkait dengan penelitian/triangulasi yaitu masyarakat Kota Semarang.

1.9.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, internet, tabel atau grafik dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga akan mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian. Data-data ini juga bisa didapatkan dengan meminta atau meminjam dari instansi terkait yang menjadi objek penelitian. Menurut Danim (2000: 20) bahwa data sekunder merujuk kepada analisis atau analisis ulang yang bersumber dari dokumen atau data yang diperoleh oleh subjek lain.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau proses di mana penulis mengajukan pertanyaan kepada informan secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasilnya merupakan data sekunder. Wawancara dilakukan di Dinas Sosial serta beberapa masyarakat Kota

Semarang sesuai kecamatan yang menerima bantuan social pangan tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada informan yang tidak terlalu besar.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka bagi penelitian meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah atau artikel, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan panduan.

1.11 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisa kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dikelompokkan atau diinterpretasikan berdasarkan sifat data dan kemudian diadakan interpretasi terhadap data yang didasarkan pada fakta serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang lebih bermanfaat. Teknik analisa ini menjelaskan tentang latar belakang, proses, rencana, dan rancangan strategis tentang Implementasi Bantuan Non Tunai di Kota Semarang.

1.11.1 Analisis Interpretasi Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 2009:330-331):

- a.** Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b.** Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c.** Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d.** Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda, dan orang pemerintahan. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan